

**L A P O R A N**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**( L K I P ) TAHUN 2024**

**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dinaikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan **pelaporan kinerja** yang berisi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan/ kegagalan terhadap penyelenggaraan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi organisasi. Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini dilakukan juga untuk mengembangkan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel.

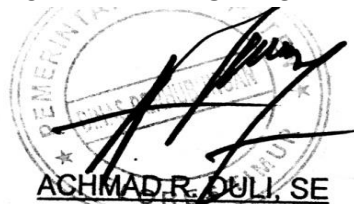
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tentang kinerja OPD selama tahun 2024. Hasilnya diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah secara akuntabel kepada publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah

mendukung penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 diucapkan terimakasih.

Larantuka, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Flores Timur government. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Achmad R. Duli'.

**ACHMAD R. DULI, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196505161992031008

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Otonomi Daerah telah bergulir sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut harus diwujudkannyatakan oleh sebuah daerah otonom seperti halnya Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas perencanaan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat di sektor transportasi. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah membentuk organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhir yaitu terwujudnya good governance.

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Organisasi Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terbentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 memiliki dukungan potensi sumber daya

manusia baik dari kuantitas maupun kualitas yang variatif siap memaksimalkan fungsinya guna mendukung terwujudnya pembangunan sektor transportasi serta tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan yang ada.

Sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dituntut untuk senantiasa berkembang seiring perubahan zaman, baik dalam hal pemikiran maupun tindakan sekaligus mampu mengimplemntasikan dalam berbagai aktivitasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKIP tahunan dan menyampaikan kepada Kepala Daerah. Laporan akuntabilitas ini memberikan gambaran tingkat ketaatan kepada peraturan yang berlaku, dan kewajiban untuk mengevaluasi kinerja dinas.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKIP ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024. Adapun maksud dan tujuan daripada penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKIP Tahun 2024 adalah :

1. Untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024, untuk kemudian

diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur pada tahun berikutnya

### **C. GAMBARAN SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN**

#### **1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.**

Dalam upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan untuk melaksanakan visi dan misinya maka, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mengemban Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut diatas menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :
  - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
  - Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan.

#### **2. Organisasi**

Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terdiri dari unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

2. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

c. Pelaksana adalah Bidang dan Seksi serta Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari :

1) Bidang Perhubungan Darat :

- Seksi Angkutan Darat.
- Seksi Prasarana & Sarana Perhubungan Darat.

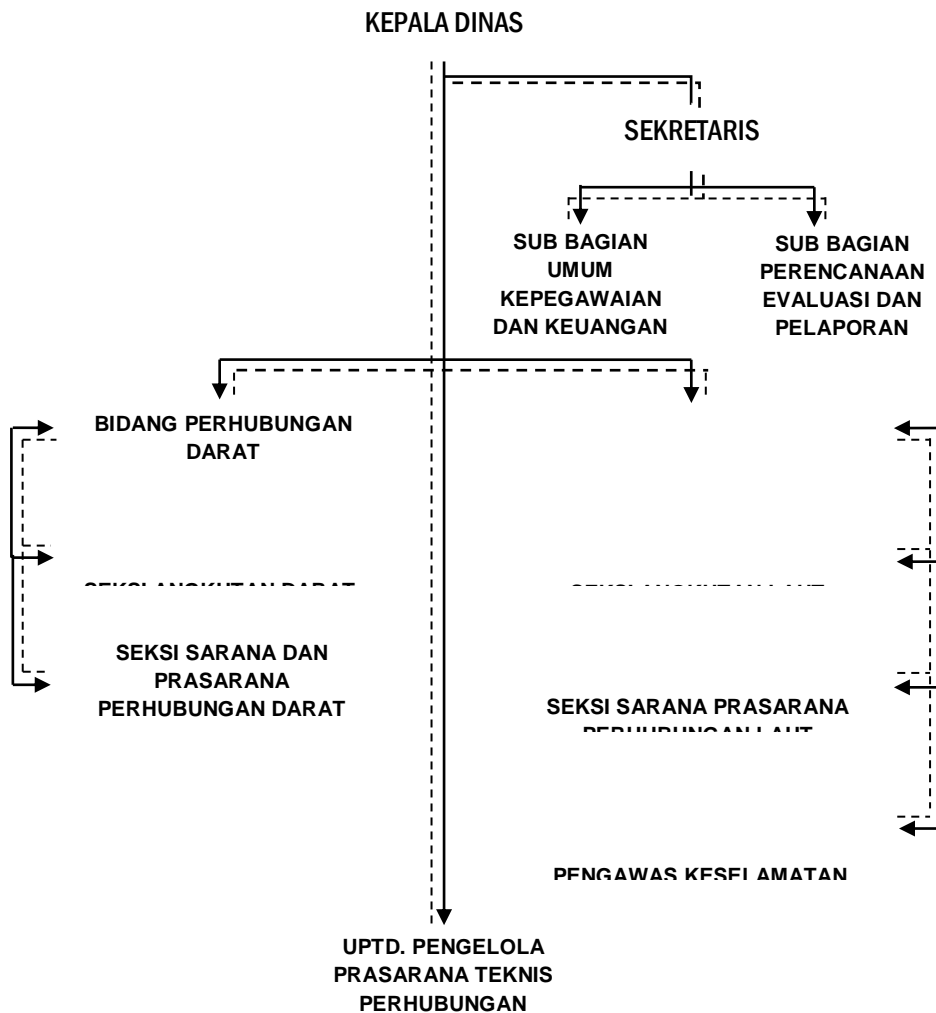
2) Bidang Perhubungan Laut :

- Seksi Angkutan Laut.
- Seksi Prasarana Sarana Perhubungan Laut
- Pengawas Keselamatan Ahli Muda.

3) UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

### **3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur maka Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :



#### 4. Proporsi Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya aparatur berjumlah 37 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. Data jumlah sumber daya aparatur Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



a. Klasifikasi menurut golongan / ruang :

No	Golongan / Ruang	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV.c	1	-	1
2.	Golongan IV.b	-	-	-
3.	Golongan IV.a	1	-	1
4.	Golongan III.d	4	-	4
5.	Golongan III.c	1	1	2
6.	Golongan III.b	8	1	9
7.	Golongan III.a	3	-	3
8.	Golongan II.d	7	4	11
9.	Golongan II.c	-	-	-
10.	Golongan II.b	-	-	-
11.	Golongan II.a	1	-	1
12.	Golongan I.d	-	-	-
13.	Golongan I.c	1	-	1
14.	Golongan I.b	-	-	-
15.	Golongan I.a	-	-	-
	Jumlah			33

b. Klasifikasi menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S1 / D.IV	6	1	-	-	7
2.	Diploma III	6	1	1	-	8
3.	Diploma II	-	-	-	-	-
4.	Diploma I	-	-	-	-	-

5.	SMA Sederajat	13	4	3	-	20
6.	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
7.	SD	1	-	-	-	1
	Total					37

c. Klasifikasi PNS menurut jabatan struktural / fungsional :

No	Jabatan Struktural	L	P	Jumlah
1.	Eselon II.b	1	-	1

2.	Eselon III.a	-	-	-
3.	Eselon III.b	1	-	1
4.	Eselon IV.a	2	1	3
5.	Fungsional Khusus	2	-	2
6.	Fungsional Umum	20	5	25
	Total			32

## **D. ISU- ISU STRATEGIS**

### **1. Permasalahan Utama**

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan masyarakat pada sektor transportasi sangat erat hubungannya dengan perannya dalam mendukung pencapaian pembangunan pada sektor yang lain. Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur pada sektor transportasi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1.1. Bidang Perhubungan Darat :**

- Ketidaknyamanan lalu lintas jalan oleh karena bangkitan lalu lintas dan hambatan samping.
- Ketidaknyamanan lalu lintas jalan oleh sebab pemalakan terhadap pengguna angkutan pedesaan.
- Ketidaknyamanan lalu lintas oleh karena kondisi kendaraan angkutan yang tidak laik.
- Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
- Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana transportasi (kuantitas / kualitas).
- Masih kurangnya ketersediaan alat perlengkapan jalan terutama LPJU, Rambu, Guardrail,dll.
- Minimnya kualitas SDM aparatur yang berkompeten di bidang perhubungan.

#### **1.2. Bidang Perhubungan Laut :**

- Belum optimalnya pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal yang di bangun dan dikelola pemerintah daerah sesuai fungsinya.
- Ketertiban di lingkungan pelabuhan pengumpan lokal.
- Sering terjadi permainan tarif angkutan laut /penyeberangan (Jtp. Pante Palo - Tanah Merah).

### 1.3. UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

- Ketidaktersediaan peralatan Uji kendaraan di Pulau Adonara dan Pulau Solor.
- Masih minimnya fasilitas pelabuhan pengumpan lokal.
- Belum optimalnya ketersediaan area / lahan parkir pada fasilitas publik.

## **2. Strategi OPD.**

### 2.1. Bidang Perhubungan Darat :

- Melakukan analisis dampak LALIN (ANDALALIN).
- Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian laliulintas dengan menambah jumlah petugas PATWAL.
- Perlu adanya Manajemen dan rekayasa lalulintas dengan melakukan penataan trayek angkutan umum.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
- Peningkatan ketersediaan alat perlengkapan jalan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
- Penyediaan areal parkir yang resprentatif pada fasilitas pelayanan publik.

### 2.2. Bidang Perhubungan Laut :

- Optimalisasi tata kelola pelabuhan pengumpan local yang dibangun dan dikelola pemerintah daerah serta

pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

- Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengguna jasa angkutan laut / penyeberangan dalam lingkungan pelabuhan pengumpan lokal.
- Peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan lokal.
- Standardisasi tarif angkutan laut dengan memberlakukan penggunaan tiket bagi para penumpang.

#### 2.3. UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

- Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
- Peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang perhubungan (Darat dan Laut).
- Peningkatan jumlah dan fungsi peralatan uji kendaraan untuk memenuhi standar pemberlakuan SIM PKB.
- Penyediaan Peralatan Uji Kendaraan Mobile (Portable).

### **3. DASAR HUKUM**

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dengan memperhatikan regulasi mendasari pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8/ 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur;
7. Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Bupati Nomor : 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
10. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;
11. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;
12. Rencana Kinerja Tahunan / RKT Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;

#### **4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan tahun 2025, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi dan isu strategi yang dihadapi organisasi

##### **BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan ikhtisar Perjanjian kinerja tahun 2025

##### **BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1    Capaian Kinerja

3.2    Perbandingan Indikator

3.3    Permasalahan dan Solusi

##### **BAB IV    PENUTUP**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Visi Pembangunan Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mendukung Visi Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 – 2025 yakni “ Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing “ dengan misi pembangunan daerah yakni :

1. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan berkeadilan
3. Mewujudkan Manusia dan Masyarakat yang bermoral dan berbudaya
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

### 2.2 Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -			
			0	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Prosentase Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	65	69,5	74,5	79,5	84,5

	ndalam Kondisi baik	dalam kondisi baiki					
	Meningk atnya Sarana dan Prasaran a TRanspo rtasi Darat dalam kondisi baik	Prosent a Sarana dan Prasaran a Transpor tasi darat dalam kondisi baik	40	48	56	62	68

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Apoaratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja , dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja,l Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur telah menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah / tanggungjawab /kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab /kinerja, Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Waktu Penyelesaian
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Transportasi	79,5	I Tahun



	Transportasi Laut dalam Kondisi Baik	Laut dalam Kondisi Baik		
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam Kondisi Baik	62	1 Tahun

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten</b>	<b>Rp.3.701.121.437</b>	
2	<b>Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<b>Rp.2.223.100.686</b>	
3	<b>Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Rp. 326.210.080</b>	

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### **I. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024**

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan capaian kinerja seluruh Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian tersebut disertai dengan analisis capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan perbandingan capaian Tahun sebelumnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur nilai peringkat kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan Program / Kegiatan serta indikator maka diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Tabel 3.1

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	➤ 85 - 100	Memuaskan
2.	A	➤ 75 - 85	Sangat Baik
3.	B	➤ 65 - 75	Baik
4.	CC	➤ 50 - 65	Cukup Baik
5.	C	➤ 30 - 50	Agak Kurang
6	D	0 - 30	Kurang

### 1. Perbandingan Antara Target dan Kinerja Tahun 2024

Secara umum capaian indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 :

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Kondisi baik	22	50	50
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam Kondisi baik	Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam Kondisi baik	47	63	63

	Konsisi Baik				

### 1.1. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur

#### a. Indikator Kunci

N o	Sasaran Startegis	Indikato r Kinerja	Bidang Urusan	SKPD Penanggu ng Jawab	Sumbe r Data	Definisi <u>Operasional</u> <u>Formula</u> <u>/Rumus</u> <u>Perhitungan</u>
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatny a Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Transporta si Laut dalam kondisi baik	Perhubun gan Laut	Dishub	Data bidang	Jlh Sarana dan Prasarana Laut yang <u>dibangunx 100</u>  Jlh Sarana dan Prasarana Laut yang dipelihara
	Meningkatny a Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Transporta si Darat dalam kondisi baik	Perhubun gan Darat	Dishub	Data bidang	Jlh Sarana dan Prasarana Darat yang <u>dibangunx 100</u>  Jlh Sarana dan Prasarana Laut yang dipelihara

#### Perbandingan per Indikator

Sasaran Strategis	Indikator /Satuan	Capaian		Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Sarana dan	Sarana dan Prasarana	-	-	2	2	100%

<b>Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik</b>	<b>Transportasi Laut dalam kondisi baik</b>					
<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik</b>	<b>Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik</b>	-	<b>47 %</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>87,5%</b>

- Pada Indikator Pertama perlu dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur melaksanakan Sarana dan Prasarana transportasi laut dalam hal ini Pemeliharaan Jembatan Tambatan Perahu ( JTP ) sebanyak 22 unit namun di Tahun 2024 dialokasi anggaran hanya 2 pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Lohayon dan Pelabuhan Penyeberangan Deri – Ile Boleng.
- Pada Indikator Kedua perlu dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan melaksanakan Sarana dan Prasarana transportasi Darat yaitu Pengadaan Lampu Penerangan Jalan sebanyak 30 unit di Tahun 2024.

## 2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024

Target dan Realisasi Belanja APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi

### Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.701.121.437	3.552.420.633	95,17
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik	326.210.080	311.083.900	95,36
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik	2.223.100.686	1.939.604.278	87,24
		Total	6.250.432.203	5.803.108.811	92, 84

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur di Tahun 2024 bahwa tingkat capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 92,84masih dalam nilai interval angka 85 – 100 dengan interpretasi Memuaskan ,dari keberhasilan yang dicapai di tahun 2024 kedepannyatetap dipertahankan bahkan ditingkatkan .

## II. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan peran serta semua pihak ( Stakholder ) dan juga dukungan Dana dari Pemerintah Daerah serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dengan melibatkan Pemerintah,Swasta dan Masyarakat.

### a. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat**

- Kurangnya Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
- Masih sangat minimnya SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur yang berkompeten berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Kurangnya Fasilitas Perlengkapan Jalan
- Masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk menerima langkah-langkah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi disektor Transportasi.
- Kurangnya Ketersediaan Prasarana Fasilitas Terminal Tipe C
- Kurangnya Ketersediaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

- **Solusi**

- Perlu adanya relevansi penganggaran pada Program yang mendukung kegiatan dilapangan.
- Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia dalam mengatur keamanan dan kenyamanan lalu lintas .
- Perlu adanya Penataan dan kerjasama dalam rangka pengembangan perparkiran pada tempat-tempat khusus sehingga dapat meningkatkan PAD yaitu retribusi Parkir serta dapat meningkatkan ketertiban kendaraan di Kota Larantuka.

- **Permasalahan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut**

- Belum optimalnya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Transportasi Laut.
- Kurangnya ketersediaan Terminal Pelabuhan /JTP
- Kurangnya Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Laut

- Masih terdapat sejumlah Jembatan Tambatan Perahu yang belum dikelola secara baik.
- Masih lemahnya manajemen pengelolaan pelabuhan dan jembatan tambatan perahu.
- Masih relative rendahnya pendanaan pembangunan dan penyediaan sarana prasarana transportasi laut guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur.

- **Solusi**

- Perlu adanya Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang dibangun.
- Perlu alokasi anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan terhadap Jembatan Tambatan Perahu.
- Perlu dibangunnya Fasilitas yang mendukung pelabuhan.
- Perlu adanya Manajemen Pengelolaan Pelabuhan dan Jembatan Tambatan Perahu.
- Perlu adanya simpul transportasi Pelabuhan laut dan Penyeberangan di daratan Larantuka, Adonara, Solor dapat menjadi alternative dan daya hubung antar pulau bagi mobilisasi orang dan distribusi barang / jasa dengan asal tujuan khususnya kabupaten sekitar dan kabupaten flores timur
- Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat ( DAK Transprtasi Perairan ) dan Pemerintah Daerah,sebagai factor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.



## **BAB IV PENUTUP**

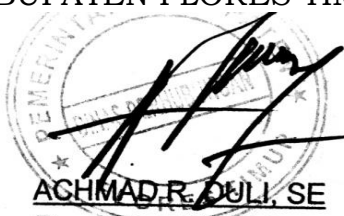
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP ) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel. Melalui penyajian LKIP ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur *dinilai sangat tinggi (92,84%)* apabila dilihat dari pencapaian secara umum.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur , kiranya dapat menjadi bahan informasi/ evaluasi dan kajian untuk perencanaan pembangunan kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Larantuka, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

  
**ACHMAD R. DULI, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196505161992031008

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**TAHUN 2025**

NO	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatkan pelayanan kegiatan perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Perkantoran	Prosentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			4.640.111.837,00	
				Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	20.998.542,00	
					Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	Dokumen	14.998.305,00	
					Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	12.495.441,00	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	9.994.695,00	

				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	4.233.616.355,00	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	44.750.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	2	Laporan	14.997.921,00	
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)	4	Dokumen	4.999.044,00	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	Laporan	7.498.518,00	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	Laporan	7.499.732,00	
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	Dokumen	4.999.793,00	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	Dokumen	4.974.131,00	

					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	14.999.679,00	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5	Paket	1.984.229,00	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1	Paket	5.485.156,00	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	2	Paket	4.999.798,00	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang di sediakan	1	Paket	29.997.432,00	
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	2	Paket	14.999.670,00	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	12	Dokumen	1.200.000,00	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000,00	

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	59.995.745,00	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat	12	Laporan	1.238.671,00	
					Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12	Laporan	19.996.305,00	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14	Unit	84.392.675,00	
					Pemeliharaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	5	Unit	4.000.000,00	
II.	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan n Lalulintas dan angkutan Jalan</b>	<b>Meningkatn ya Penyelenggaraan Lalulintas dan angkutan Jalan</b>	<b>Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalulintas dan angkutan Jalan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>					1.959.920.742,00	
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota</b>	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	40	Unit	1.479.930.404,00	

				<b>Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	1	Laporan	9.998.774,00	
				<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	Unit	250.000.000,00	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1	Orang	39.999.376,00	
					Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	50	Unit	24.995.215,00	
					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2	Laporan	10.000.000,00	
				<b>Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2	Laporan	40.000.000,00	

				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten</b>	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	2	Laporan	74.999.513,00	
				<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	5	unit	9.999.608,00	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.(laporan)	1	Laporan	19.997.852,00	
III.	<b>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Meningkatn ya Kualitas Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Prosentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>					294.981.339,00	



				<b>Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten.	Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	4	Laporan	19.994.459,00	
				<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota</b>	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujuinya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah (dokumen)	1	Dokumen	14.994.374,00	
					Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pesetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah (laporan)	6	Laporan	59.999.267,00	
				<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal (laporan)	22	Laporan	199.993.239,00	
	<b>JUMLAH</b>								<b>6.895.013.918</b>	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Kondisi Baik	74,5
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dalam Kondisi Baik	56

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kabupaten	Rp 3.701.121.437	
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 2.223.100.686	
3	Pengelolaan Pelayaran	Rp 326.210.080	

**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR**

**TAHUN 2024**

NO	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatkan pelayanan Kegiatan perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Perkantoran	Prosentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			3.701.121.437,00	
				Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	14.999.286,00	
					Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	Dokumen	14.999.910,00	
					Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	9.999.742,00	

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	25.540.176,00	
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Orang /Bulan	3.025.754.716,00	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	60.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	1	Laporan	14.985.422,00	
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)	6	Laporan	9.999.854,00	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	Laporan	9.999.648,00	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	Laporan	9.998.900,00	
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	Paket	4.999.050,00	

					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	Orang	10.000.000,00	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5	Paket	6.931.466,00	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1	Paket	4.996.500,00	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	2	Paket	4.987.055,00	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang di sediakan	2	Paket	22.494.150,00	
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	2	Paket	4.999.680,00	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	12	Lapor an	16.320.000,00	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lapor an	101.159.595,00	

					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	4.988.812,00	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat	12	Laporan	1.979.250,00	
					Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12	Laporan	24.690.000,00	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	169.050.000,00	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14	Unit	108.293.350,00	
					Pemeliharaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	10	Unit	2.000.000,00	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedungkantordanba ngunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	2	Unit	1.984.500,00	

					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedungkantor dan ba ngunanLainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	2	Unit	14.970.375,00	
II.	<b>Meningkatka n Penyelengga raan Lalulintas dan angkutan Jalan</b>	<b>Meningkatn ya Penyelengga raan Lalulintas dan angkutan Jalan</b>	<b>Prosentase Peningkatan Penyelengga raan Lalulintas dan angkutan Jalan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>					2.223.100.686,00	
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota</b>	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	47	Unit	1.764.997.701,00	
				<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)	1	Unit	29.999.685,00	
				<b>Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	3	Lapor an	38.211.500,00	

				<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasaranan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	3	Unit	15.000.000,00	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	Orang	61.820.520,00	
					Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	100	Unit	36.718.200,00	
					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3	Laporan	14.999.880,00	
				<b>Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	12	Laporan	46.769.450,00	



				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten</b>	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	14	Laporan	24.998.500,00	
				<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satua) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	Dokumen	119.590.800,00	
				<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	42	Laporan	19.999.760,00	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.(laporan)	11	Laporan	24.999.590,00	

				<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota (Dokumen)	1	Doku men	24.995.100,00	
III.	<b>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Prosentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>					326.210.080,00	
				<b>Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)	34	Doku men	19.989.150,00	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten.	Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	68	Lapor an	19.928.724,00	

				<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota</b>	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujui nya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah (dokumen)	2	Doku men	19.932.974,00	
					Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pesetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah (laporan)	22	Lapor an	121.712.112,00	
				<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLK P) Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	Doku men	19.998.600,00	
					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan			19.998.600,00	

						(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				
				<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal (laporan)	22	Lapor an	104.649.920,00	
	<b>JUMLAH</b>								<b>6.250.432.203</b>	

**PENETAPAN KINERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatkan Pelayanan Kegiatan Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				3.701.121.437
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	14.999.286,00
		Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2	Dokumen	14.999.910,00

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan apaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Kinerja SKPD	6	Dokumen	9.999.742,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	25.540.176,00
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	3.025.754.716,00
		Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	60.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	1	Laporan	14.985.422,00

		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Laporan	9.999.854,00
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	9.999.648,00
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	9.998.900,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Paket	4.999.050,00
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Orang	10.000.000,00
		Jumlah paket instalasi listrik penerangan bangunan kantor	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5	Paket	6.931.466,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	4.996.500,00

		Jumlah Paket Peralatan Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	Paket	4.987.055,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang di sediakan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Paket	22.494.150,00
		Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	2	Paket	4.999.680,00
		Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu		Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	16.320.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	101.159.595,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	4.988.812,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.979.250,00



		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12	Laporan	24.690.000,00
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	169.050.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14	Unit	108.293.350,00
		Jumlah peralatan mesin yang dipelihara		Pemeliharaan Peralata dan Mesin Lainnya	10	Unit	2.000.000,00
		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedungkantordanbanguna nLainnya	2	Unit	1.984.500,00

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedungkantorandanguna nLainnya	2	Unit	14.970.375,00
<b>II.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Prasarana Transportasi</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Lalulintas dan angkutan Jalan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				<b>2.223.100.686</b>
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota</b>	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	47	Unit	1.764.997.701,00
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1	Unit	29.999.685,00

		Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	<b>Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	3	Laporan	38.211.500,00
		Jumlah sarana dan Prasaranan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3	Unit	15.000.000,00
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Orang	61.820.520,00
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100	Unit	36.718.200,00

		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3	Laporan	14.999.880,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	<b>Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	12	Laporan	46.769.450,00
		Jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten</b>	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota	14	Laporan	24.998.500,00
		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	119.590.800,00

		Jumlah laporan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	42	Laporan	19.999.760,00
		Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.(laporan)		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.	11	Laporan	24.999.590
		Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota (Dokumen)	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	1	Dokumen	24.995.100,00

III.	Meningkatnya Kualitas Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pelayaran	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				326.210.080
		Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)	<b>Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	34	Dokumen	19.989.150,00
		Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten.	68	Laporan	19.928.724,00

		Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujui nya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah (dokumen)	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota</b>	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	19.932.974,00
		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah (laporan)		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pesetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	22	Laporan	121.712.112,00
		Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujui nya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah (dokumen)	<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	19.998.600,00

		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah (laporan)		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pesetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota			19.998.600,00
		Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal (laporan)	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	22	Laporan	104.649.920,00
	<b>JUMLAH</b>						<b>6.250.432.203</b>



**REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024**  
**DINAS PERHUBUNGAN KAB. FLORES TIMUR**

NO	JENIS PENDAPATAN	URAIAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
	Hasil Retribusi Daerah						
1	Retribusi Jasa Umum	1	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	3.117.600	18.748.000		
		2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	Tidak di pungut sejak 01 Januari 2024		
2	Retribusi Jasa Usaha	1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan				
		2	Retribusi Terminal	24.066.000	24.036.000		
		3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.379.000	20.881.000		
		4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	112.227.324	174.789.500		
3	Hasil Sewa BMD	1	Sewa Kios, Sewa Rambu Lalu Lintas, Sewa Bus Sekolah	21.600.000	57.700.000		
JUMLAH				367.389.924	296.154.500	81%	

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.995.150	39.914.000	99,80%	
		Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	12.000.000	11.994.950	99,96%	
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan apaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	27.773.820	27.769.650	99,98%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.407.235	22.354.050	95,50%	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.737.976.525	2.631.669.495	96,12%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Peleaksanaan Tugas ASN	45.000.000	45.000.000	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	14.999.350	14.991.600	99,95%	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	24.967.525	24.607.500	98,56%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan peletihan	47.830.000	27.065.000	56,59%	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1.999.373	1.969.000	98,48%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	19.997.800	19.995.500	99,99%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	7.499.850	7.498.000	99,98%	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang di sediakan	29.982.600	29.837.600	99,52%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	25.000.000	24.999.900	100,00%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	15.000.000	14.993.000	99,95%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.520.000	82.333.080		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat	1.499.825	1.491.600	99,45%	
		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	16.020.000	15.855.500	98,97%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	265.600.000	262.400.000	98,80%	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	54.334.563	44.471.359	81,85%	
		Pemeliharaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	4.950.000	4.868.000	98,34%	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	35.609.125	35.601.500	99,98%	
<b>Jumlah 1</b>				<b>3.533.962.741</b>	<b>3.391.680.284</b>	<b>95,97%</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota</b>	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	1.689.576.875	1.484.238.500	87,85%	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	13.622.600	13.435.000		

	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	55.037.950	54.743.700	99,47%	
	<b>Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	39.070.000	39.060.000	99,97%	
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/ Kota</b>	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tatakelola Andalalin yang ditetapkan	24.999.000	24.985.000	99,94%	
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten</b>	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	34.995.400	34.995.000	100,00%	

	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	19.990.750	19.890.000	99,50%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota. (laporan)	67.237.850	67.174.000	99,91%	
<b>Jumlah 2</b>				<b>1.944.530.425</b>	<b>1.738.521.200</b>	<b>89,41%</b>	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)	19.988.550	19.759.000	98,85%	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten.	Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	19.965.000	19.965.000	100,00%	
	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota</b>	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujuiinya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah (dokumen)	19.999.550	19.951.300	99,76%	
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Peseetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah (laporan)	24.994.975	24.967.243	99,89%	
	<b>Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal</b>	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolahan Izin Usaha jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Berusaha Terintegerasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolahan Izin Usaha jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Berusaha Terintegerasi secara Elektronik	74.980.000	64.081.000	85,46%	



	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal (laporan)	25.977.590	25.716.000	98,99%	
<b>Jumlah 3</b>				<b>185.905.665</b>	<b>174.439.543</b>	<b>93,83%</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>5.664.398.831</b>	<b>5.304.641.027</b>	<b>93,64%</b>	